

RENCANA KERJA

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN PROVINSI MALUKU UTARA

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Bismillahir'rahmanir'rahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, atas berkenaan-NYA dan Rahmat-NYA, maka upaya serta usaha dari segenap aparaturnya Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara, akhirnya dapat merampungkan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2025.

Shalawat serta salam, selalu dan selamanya kami kirimkan kepada Baginda Rasulullah SAW, Nabi pembawa rahmat, petunjuk, penyejuk jiwa serta penyelamat kepada setiap insan yang mencintai dan merindukannya dalam menegakkan "Lailaha'illallah Muhammad'darrasulullah".

Kami menyadari bahwa, didalam penyusunan dokumen RENJA ini masih terdapat banyak, kelemahan serta kekurangan, untuk itu saran, ide, kritik maupun masukan selalu kami mengharapkannya, agar dapat memperkuat kelemahan dan menutupi kekurangan tersebut, karenasebaik-baik perencanaan, adalah Allah SWT, dan sebaik-baik implementasi perencanaan ialah Nabi Muhammad SAW.

Sofifi, Maret 2025

Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika Dan Persandian
Provinsi Maluku Utara



DR. IKSAN R.A. ARSAD, M.Si

Np. 19701104198902 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daaerah.....	18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	20
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	21
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah	21
3.3. Program Dan Kegiatan.....	26
BAB IV PENUTUP	35



DAFTAR TABEL

Tabel Tc29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Provinsi Maluku Utara.....	11
Tabel Tc.30. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara.....	12
Tabel Tc.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Maluku Utara tahun 2024.....	13
Tabel Tc.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....	14
Tabel Tc.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024..	15



BAB I

PENDAHULUAN

2.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara adalah dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Tahun 2025. Penyusunan Renja Dinas mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan infrastruktur TIK, sumber daya manusia IT, Single Data System (SDS) Maluku Utara, terwujudnya smart province Maluku Utara sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia. Hal tersebut bertujuan dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum didalam RKPD dan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Tahun 2025-2026.

Urusan Pemerintahan Bidang Kominfo, Statistik, dan Persandian menjadi sektor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara dalam membangun Maluku Utara. Peran tersebut ditempuh melalui perumusan, pelaksanaan, pemantauan, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan informasi serta komunikasi publik, penyelenggaraan statistik sektoral, domain instansi penyelenggara negara, persandian dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi.



Renja perangkat daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Provinsi Maluku Utara.

Keterkaitan Rencana Kerja SKPD daerah dengan dokumen RKPD dan Rencana Strategis perangkat daerah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Rencana Kerja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra perangkat daerah dan RKPD. Rencana Kerja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis SKPD dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA PPAS dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

2.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang



- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, akan dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 16. Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang



Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

18. Permendagri 77 Tahun 2020 Tahu 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Instruksi nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan periode rencana pembangunan jangka menengah daerah berakhir pada tahun 2024
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang perangkat daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 0 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Provinsi Maluku Utara 2020-2024;
23. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara;
24. Peraturan Gubernur Maluku Utara No 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian.

2.3. Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan dan penetapan Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara yaitu sebagai berikut :

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan dan penetapan Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara ini adalah untuk



mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan perangkat daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah pada tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Sementara, tujuan penyusunan dan penetapan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 ini adalah :

- a) Menyediakan dokumen perencanaan kerja tahun 2025;
- b) Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025;
- c) Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja perangkat daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja perangkat daerah, proses penyusunan Renja perangkat daerah, keterkaitan antara Renja perangkat daerah dengan dokumen RKPD, Renstra perangkat daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.



1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Memuat penjelasan ringkas, tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat tata cara penulisan yang dapat memberikan kemudahan dalam membaca, memahami serta menjelaskan dokumen rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja perangkat daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah



Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian programnasional/internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayananperangkat daerah dan;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yangdirencanakan;

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu



penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra perangkat daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, paguindikatif, maupun kombinasi keduanya.
4. Tabel rencana program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan penyusunan Renja yang kami susun ini menjadi penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang disusun setelah ditetapkan APBD.

Sementara, perkiraan capaian tahun berjalan di tahun 2025, mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2024 yang sementara berjalan, berdasarkan realisasi program dan kegiatan perbulan Maret, pelaksanaan Renja perangkat daerah pada tahun-tahun sebelumnya yang kami susun bersamaan dengan penyusunan Dokumen Renca Kerja, agar proses dokumen perencanaan dapat memiliki keterkaitan serta dapat dilaksanakan dalam tujuan pembangunan daerah yang lebih terukur dan bermanfaat bagi masyarakat.

Berikut ini kami sajikan Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara s/d Tahun 2025 (tahun berjalan) dalam bentuk matrik analisis sederhana, sebagaimana tabel berikut:



Tabel : 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dan
Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Provinsi Maluku Utara**

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2024 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d (tahun 2023)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (tahun n- 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2024 (tahun berjalan/n-3)		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
2	10				Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi Dan Informatika										
2	10	01			Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian										
2	10	01	01		Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)	80 Persen	0	0	0	0%	0	0	0,00%	
2	10	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Pengelolaan Surat Masuk Dan Keluar	720 Surat	0	150	150	100%	0	0	0,00%	Kasubag. Umum Dan Kepegawaian



**RENCANA KERJA
DISKOMINFOSAN
TAHUN 2025**

2	10	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah SPD, SPP, SPM dan SPJ	100%	SPD, SPP,SPM DAN SPJ	0	0	0	100 %	0	0	100%	Kasubag. Perencanaan, Keuangan Dan BMD
2	10	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bahan-bahan	250	Bahan	0	0	0	100 %	0	0	100%	Kasubag. Umum Dan Kepegawaian
2	10	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Diskominfo	100%	ATK	0	0	0	83 %	0	0	83%	Kasubag. Umum Dan Kepegawaian
2	10	01	01	22	Penyedia Administrasi Kepegawaian	Jumlah Proses dan pengurusan Administrasi kenaikan Pangkat Pegawai ASN	100%	Pengurusan Administrasi	0	0	0	0%	0	0	0,00%	Kasubag. Umum Dan Kepegawaian
2	10	01	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Barang Dan Alat		Paket	0	0	0	86 %	0	0	86%	Kasubag. Perencanaan, Keuangan Dan BMD
2	10	01	01	20	Penyediaan Jasa tenaga honoror	Jumlah SDM yang diangkat menjadi Pegawai Honoror	10	Tenaga Honoror	0	0	0	92 %	0	0	92%	Kasubag. Umum Dan Kepegawaian
2	10	01	01	23	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan	20%	Pemeliharaan	0	0	0	100 %	0	0	100%	Kasubag. Perencanaan, Keuangan Dan BMD
2	10	01	01	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Makan Minum Pegawai	4	Bulan	0	0	0	100 %	0	0	100%	Kasubag. Perencanaan, Keuangan Dan BMD
2	10	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Perjalanan	25	Perjalanan	0	0	0	100 %	0	0	100%	Kasubag. Umum Dan Kepegawaian
2	10	01	01	19	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan	20	Perjalanan	0	0	0	100 %	0	0	100%	Kasubag. Umum Dan Kepegawaian
2	10	01	01	22	Rapat Koordinasi Persandian	Jumlah Perjalanan	36	Perjalanan	0	0	0	0%	0	0	0,00%	Kasubag. Umum Dan Kepegawaian
2	10	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	86 %	0	0	86%	Kasubag. Perencanaan, Keuangan Dan BMD



**RENCANA KERJA
DISKOMINFOSAN
TAHUN 2025**

2	10	01	01	24	Penyediaan Jasa Tenaga Ahli/Staf Khusus Gubernur Bidang IT	Tenaga IT	7% Jasa Tenaga Ahli/Staf Khusus Gubernur Bidang IT	0	0	0	100 %	0	0	100%	Kasubag. Umum Dan Kepegawaian
2	10	01	01	03	Penyediaan Jasa SPBE	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0%	0	0	0,00%	Kasubag. Perencanaan, Keuangan Dan BMD
2	10	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Betambahnya SDM Pada Bagian Perencanaan		0	0	0	0%	0	0	0,00%	
2	10	01	05	04	Bimbingan Teknis Sistem Aplikasi Perencanaan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	0	0	0	0%	0	0	0,00%	Kasubag. Umum Dan Kepegawaian
					Sinkronisasi Perencanaan	Sinergitas perencanaan OPD	1 kegiatan	0	0	0	0%	0	0	0,00%	Kasubag. Umum Dan Kepegawaian
					Benchmark Penerapan E-government	Terlaksananya E-Government	1 Paket	0	0	0	0%	0	0	0,00%	Kasubag. Umum Dan Kepegawaian
					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya SDM	1 Paket	0	0	0	0%	0	0	0,00%	Kasubag. Umum Dan Kepegawaian
					Bimtek Pelaksanaan SOP	Tersedianya SDM	1 Paket	0	0	0	100%	0	0	100%	Kasubag. Umum Dan Kepegawaian
2	10	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tersusunnya Kebutuhan Dokumen Dan Laporan Bidang Kominfo Dan Persandian Dapat Terwujud	2.160 Paket	0	0	0	0%	0	0	0,00%	
2	10	01	06	05	Penyusunan dan Penginputan Renja, LKJ, LPPD, dan RKA/DPA	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Keuangan	5 Dokumen Perencanaan	0	0	0	100 %	0	0	100%	Kasubag. Perencanaan, Keuangan Dan BMD



RENCANA KERJA
DISKOMINFOSAN
TAHUN 2025

2	10	01	06	06	Penyusunan dan Penginputan Renstra	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Keuangan	1 Dokumen	0	0	0	100 %	0	0	100%	Kasubag. Perencanaan, Keuangan Dan BMD
2	10	01	06	07	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan	1 Dokumen	0	0	0	100 %	0	0	100%	Kasubag. Perencanaan, Keuangan Dan BMD

2	10	01	20		Program Fasilitas Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedianya Sistem Informasi Dan Komunikasi Berbasis Teknologi Yang Dapat Digunakan Dalam Melaksanakan Tugas Aparatur		0	0	0	0%	0	0	0,00%	
2	10	01	20	01	Pengembangan Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi (Kota Sofifi)	Jumlah Laporan Perjalanan Koordinasi dan Konsultasi	1 Kegiatan	0	0	0	0%	0	0	0,00%	Kasie Tata Kelola Persandian
2	10	01	20	03	Pengembangan Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi (Blank spot)Halmahera Utara	Jumlah Laporan Perjalanan	1 Kegiatan	0	0	0	0%	0	0	0,00%	Kasie Tata Kelola Persandian
2	10	01	20	04	Pengembangan Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi (Blank spot) Taliabu	Jumlah Laporan Perjalanan	1 Kegiatan	0	0	0	0%	0	0	0,00%	Kasie Tata Kelola Persandian
2	10	01	21		Prog. Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publi dan Aplikasi Informasi										



RENCANA KERJA
DISKOMINFOSAN
TAHUN 2025

2	10	01	21	01	Pengembangan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah SDM Tersedia	10 ASN	0	0	0	0%	0	0	0,00%	Bidang KIP
2	10	01	21	02	Bimbingan Teknis Penelolaan PPID	Jumlah SDM Tersedia	Paket	0	0	0	0%	0	0	0,00%	Kasie Tata Kelola Persandian
2	10	01	21	03	Desiminasi Informasi Kegiatan pemerintah Daerah Melalui Website dan Medsos	Jumlah Informasi Melalui Web	1 Paket Lapora	0	0	0	0%	0	0	0,00%	Bidang Kominfo Publik
2	10	01	21	04	Pengembangan Aplikasi dan Web	Jumlah Aplikasi Web	1 Paket Aplikasi	0	0	0	0%	0	0	0,00%	Bidang Infrastruktur
2	10	01	21	05	Pengembangan dan Pengelolaan Media Center Provinsi Maluku Utara	Terkelolanya Medi Centre	Paket	0	0	0	40%	0	0	40%	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya
2	10	01	21	06	Kerjasama Penyediaan Jaringan/Jasa Internet	Tersedianya Informasi	1 Paket	0	0	0	100 %	0	0	84%	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya
2	10	01	21	07	Pengelolaan Domain dan Hosting	Tersedianya Informasi	1 Paket	0	0	0	100 %	0	0	100%	Kasi Aplikasi Infrastruktur
2	10	01	21	08	Kerjasama Pengelolaan Informasi Melalui Online	Jumlah Informasi	150 Informasi	0	0	0	100 %	0	0	93%	Kasie Layanan Manajemen Data Dan Informasi E-Government



RENCANA KERJA
DISKOMINFOSAN
TAHUN 2025

2	10	01	21	09	Pembuatan Website SKPD Provinsi Maluku Utara	Jumlah Kapasitas Bandwidth	100 Mbps	0	0	0	100 %	0	0	100%	Kepala Seksi Layanan Infrastruktur, Komunikasi dan Keamanan Jaringan TIK
2	10	01	21	10	Pengembangan Rancangan Teknis SPBE Provinsi Maluku Utara	Tersedianya Layanan Informasi Online Pemda.	1 Paket	0	0	0	100 %	0	0	100%	Kasie Layanan Manajemen Data Dan Informasi E-Government
2	10	01	21	11	Pembangunan Satu Data Maluku Utara	Terwujudnya satu Data Prov. Maluku Utara	100%	0	0	0	100 %	0	0	100%	Kasie Pelayanan Penyelenggaraan E-Government
2	10	01	21	12	Operasional Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku Utara	Tersedianya Data dan Informasin Covid-19	100%	0	0	0	100 %	0	0	100%	Kasie Pelayanan Penyelenggaraan E-Government
2	10	01	22		Program : Penyelenggaraan Persandian dan Statistik	-	-	0	0	0	0%	0	0	0,00%	Kasie Layanan Infrastruktur Komunikasi Dan Keamanan Jaringan Tik
2	10	01	22	01	Sertifikat Elektronik	Tersedianya Statistik Elektronik	60%	0	0	0	0%	0	0	0,00%	Kepala Bidang Persandian dan Statistik
2	10	01	22	02	Mengikuti Seleksi Diklat Sandiman Dasar		-	0	0	0	0%	0	0	0,00%	Kepala Bidang Persandian dan Statistik
2	10	01	22	03	Sterilisasi Kontra Pengindaran Pada Aset Perangkat Daerah	Pengembangan BTS	32%	0	0	0	0%	0	0	0,00%	Kepala Bidang Persandian dan Statistik



RENCANA KERJA
DISKOMINFOSAN
TAHUN 2025

2	10	01	22	14	Mengikuti Diklat Sandiman dan Diklat Sandiman Dasar	-Tersedian SDM Persandian	-	0	0	0	0%	0	0	0,00%	Kepala Bidang Persandian dan Statistik
2	10	01	22	15	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi Sandi (JKS)	Tersedianya Dokumen Jaringan Komsan	5 jaringan	100%	100%	32%	0,32%	0	0	100%	
2	10	01	22	06	Pelaksanaan Pengamanan Sinyal Melalui Jamer	Data untuk Daerah Blankspot (3T)	3 Kab	0	0	0	0%	0	0	0,00%	Bidang Statistik dan Persandian
2	10	01	22	07	Koordinasi Persandian/Statistik Sektoral	Jumlah Pengelola	7 Orang	0	0	0	0%	0	0	0,00%	Bidang Statistik dan Persandian
2	10	01	22	08	Pengelolaan Keamanan Sistem Informasi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Malut	-	-	0	0	0	0%	0	0	0,00%	Bidang Statistik dan Persandian
2	10	01	22	09	Penerapan Jaringan Komunikasi Sandi di Lingkup Pemerintah Malut	-	-	0	0	0	0%	0	0	0,00%	Bidang Statistik dan Persandian
2	10	01	22	11	Pengelolaan Data Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara	Tersedianya Data Sektoral	1 Paket	100	100	100	100%	0	0	100%	Bidang Statistik dan Persandian
2	10	01	22	12	Pengembangan SDM Urusan Persandian/Statistik Sektoral	Tersedianya SDM Persandian	1 Paket	0	0	0	0%	0	0	0,00%	Bidang Statistik dan Persandian



RENCANA KERJA
DISKOMINFOSAN
TAHUN 2025

2	10	01	24		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika										
2	10	01	24	1	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Provinsi	1 Paket		100	100	100	100%			100%	Bidang Statistik dan Persandian

2.2. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Program/kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus sebagai wujud pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah 2025-2026 (RPD) Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara No 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi dan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi;

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daaerah

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Persandian diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara No 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan wujud komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berbagai upaya terus dilakukan guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Maluku Utara. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala dan hambatan baik yang bersumber dari intern maupun dari luar dinas.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi diantaranya adalah :

1. Minimnya infrastruktur dan sumberdaya di bidang teknologi informasi dan computer (TIK) dalam rangka implementasi system pelayanan pemerintahan berbasis digital (digital government services/DGS);
2. Belum optimalnya pemberitaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada media Cetak/Masa dan media online dan monitoring Isu Krisis;
3. Masih terdapatnya wilayah blank spot yang belum terlayani akses Informasi dan internet
Dalam rangka mengoptimalkan capaian kinerja dan pelayanan masyarakat serta untuk mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa yang akan datang diperlukan langkah kebijakan teknis/operasional guna mencapai tujuan sehingga misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara dapat dilaksanakan.
Langkah- langkah strategis yang perlu diupayakan antara adalah :
 - a. Mendorong efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan dengan memaksimalkan keluaran dan hasil (output dan outcome) dengan masukan (input) yang tersedia. Program dan kegiatan diarahkan untuk memecahkan isu dan masalah strategis yang dihadapi;
 - b. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dengan terus meningkatkan kualitas baik sumber daya manusia (SDM) maupun sarana dan prasarannya;
 - c. Memaksimalkan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi agar semua program/kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
 - d. ~~rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berperilaku saling menghormati sesama~~

- pengguna media sosial sehingga menimbulkan isu sara, kekerasan dan berita bohong;
- e. belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan ketersediaan sarana prasarana komunikasi, informasi yang efektif dan efisien;
 - f. Rendahnya aksesibilitas masyarakat perdesaan terhadap keterbukaan informasi global karena kurangnya sosialisasi/pelatihan tentang internet dan teknologi komunikasi dan informatika serta keterbatasan konektivitas jaringan;
 - g. Belum semua Sistem Informasi pembangunan lengkap, aman, terintegrasi dan terkelola dengan baik serta akuntabel;
 - h. masih kurangnya sumber daya manusia di bidang statistik;
 - i. jaringan internet (bandwidth) yang berada di lingkungan OPD Kantor Gubernur Maluku Utara dan di area perkantoran yang berada diluar kantor masih menjadi kendala yang harus cepat diatasi.
 - j. agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
 - k. Penataan Sistem Manajemen Informasi (SIM) berupa *software* atau aplikasi berbasis database yang telah maupun belum dibangun oleh Perangkat Daerah lingkup Provinsi Maluku Utara, guna didata, diidentifikasi dan diverifikasi kemudian dievaluasi seluruh system tersebut, agar diketahui aplikasi-aplikasi yang mirip dan yang tidak mirip, Perangkat Daerah mana yang belum membangun website, serta mana saja aplikasi yang database-nya belum terintegrasi langsung di Server Database Data Center Provinsi Maluku Utara.
 - l. penyusunan Master Plan Pembangunan Gedung Kantor, Ruang Data Center Ruang Sani
 - m. Ketersediaan SDM Aparatur yang memiliki basic pengetahuan dan keilmuan pada bidang Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Persandian dan statistik, baik diinternal Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian maupun dilingkup perangkat Daerah

Provinsi Maluku Utara masih sangat terbatas baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional bidang pelayanan dasar Kementerian Komunikasi Dan Digital serta Lembaga Sandi Negara yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara adalah sebagaimana yang dapat kami uraikan berikut ini :

3.2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian disesuaikan dengan tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Tahun 2025-2026 serta hasil analisa dari beberapa permasalahan yang menjadi tidak tercapainya target. Adapun tujuan dan sasaran tersebut yaitu :

3.2.1. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Tahun Anggaran 2025 didasari pada hasil indentifikasi isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta hasil capaian kinerja pelayanan perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Adapun tujuan RENJA-OPD yaitu sebagai berikut :

1. Transformasi Digital
2. Regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif
3. Penyusunan Dokumen Dan Pelaporan Perencanaan, Keuangan Dan Barang Milik Daerah.
4. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.

5. Efisiensi Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Dan Jaringan Komunikasi.
6. Pengidentifikasian Kebutuhan Sumber Daya Pendukung Data Center Provinsi Maluku Utara.
7. Pengklasifikasi Pengamanan Informasi, Komunikasi Dan Data Statistik Sektoral.
8. Fasilitasi Pelaksanaan Diklat Dan Bimtek Bagi SDM Aparatur Dan Masyarakat Provinsi Maluku Utara.
9. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dan Kerjasama Media Masa.
10. Penataan Dan Penetapan Organisasi Fungsional Teknologi Informasi Dan Komunikasi.
11. Penyediaan Dan Pengelolaan Sumber Daya Aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah.
12. Penyelerasan Dan Pengembangan Master Plan Dan Tata Kelola TIK Sebagai Dokumen Induk Rencana Pembangunan TIK Provinsi Maluku Utara.

3.2.2. Sasaran

Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut diatas, maka berikut ini kami menetapkan sasaran yang akan dilakukan dalam mendukung ketercapaian tujuan rencana kerja perangkat daerah, yaitu :

1. Tujuan pertama yaitu Transformasi Digital, sasarannya adalah :
terbangunnya sinergi prasyarat Pemenuhan Kewajiban menuju transformasi digital yang adaptif inklusif, memberdayakan berdaulat dan berkelanjutan terciptanya lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif.

2. Tujuan Kedua yaitu, regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif
3. Tujuan ketiga yaitu Penyusunan Dokumen Dan Pelaporan Perencanaan, Keuangan Dan Barang Milik Daerah

Sasarannya adalah :

- 1) Menyusun Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan.
 - 2) Melaksanakan Fungsi Penatausahaan Keuangan Dan Pelaporan.
 - 3) Melakukan Pendataan Barang Milik Daerah Sebagai Aset Diskominfo.
4. Tujuan keempat yaitu Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Sasarannya adalah :
Menyediakan Kantor, Peralatan Dan Perlengkapan Serta Perangkat Elektronik Sesuai Kebutuhan Aparatur
 5. Tujuan kelima yaitu Fasilitasi Pelaksanaan Peningkatan Sumber daya Aparatur:
Melaksanakan Diklat Bimtek, Pelatihan Formal dan Benchmark Bagi peningkatan SDM Aparatur.

6. Tujuan keenam yaitu Efisiensi Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Dan Jaringan Komunikasi

Sasarannya adalah :

- 1) Melakukan Pengumpulan Data Dan Informasi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur TIK Dan Jaringan Komunikasi.
- 2) Menyediakan Sumber Daya Pendukung Jaringan Komunikasi Sesuai Kebutuhan.
- 3) Menyusun Rancangan Pemanfaatan Sumber Daya Sarana Dan Prasarana Yang Lebih Efisien.

7. Tujuan ketujuh yaitu Pengidentifikasian Kebutuhan Sumber Daya Pendukung Data Center Provinsi Maluku Utara

Sasarannya adalah :

- 1) Melaksanakan Pengintegrasian Database Pada Sistem Informasi Kepegawaian, Dukcapil, Kesehatan Dan BPSDM.
- 2) Melakukan Sharing Informasi Produk Sistem Informasi Kepegawaian, Dukcapil, Kesehatan Dan BPSDM Serta Menghubungkan Jaringan Komunikasi Yang Berbeda Menuju Ke Sistem Informasi Media Center.
- 3) Mengangkat Dan Menetapkan Tenaga Pengelola Data Center Yang Handal Sesuai Spesifikasi.

8. Tujuan kedelapan yaitu Pengklasifikasi Pengamanan Informasi, Komunikasi Dan Data Statistik Sektoral

Sasarannya adalah :

Melakukan Klasifikasi Informasi, Komunikasi Dan Data Statistik Untuk Dapat Mengetahui Jenis, Type Maupun Metode Dalam Memudahkan Fungsi

Pengamanan.

9. Tujuan kesembilan yaitu Penyusunan Dokumen SPBE provinsi Maluku Utara
Sasarannya adalah :
Meningkatkan Indeks SPBE
10. Tujuan kesepuluh yaitu Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dan Kerjasama
Media Masa Untuk Memanfaatkan Media Center Sebagai Pusat Layanan
Informasi Sasarannya adalah :
Melakukan Kerjasama Media Masa Dalam Mendorong partisipasi
masyarakat Untuk memanfaatkan Media Center.
11. Tujuan kesebelas yaitu Penataan Dan Penetapan Organisasi Fungsional
Teknologi Informasi Dan Komunikasi
Sasarannya adalah :
Membangun Organisasi Fungsional TIK Dan Tenaga Yang Telah Memiliki
Kompetensi, Keterampilan, Skill Serta Pengetahuan.
12. Tujuan duabelas yaitu Penyediaan Dan Pengelolaan Sumber Daya
Aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah
Sasarannya adalah :
Mengefektifkan Fungsi Aplikasi Maupun Sistem Informasi Perangkat
Daerah.

13. Tujuan ketigabelas yaitu Penyelerasan Dan Pengembangan Master Plan Dan Tata Kelola TIK Sebagai Dokumen Induk Rencana Pembangunan TIK Provinsi Maluku Utara
- Sasarannya dadalah :
- Menetapkan Dokumen Induk Pembangunan TIK Di Provinsi Maluku Utara.

3.3. Program Dan Kegiatan

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RK-OPD) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku utara mengalami Perubahan yang mendasar baik beban kerja maupun beban sumberdaya yang harus di tanggung OPD, hal ini disebabkan lahirnya Institusi baru Komisi Informasi Publik (KIP) Maluku Utara dan Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) yang Operasional kegiatannya sesuai Perundang undangan dan peraturan menginduk pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara dan segala konsekwensinya menambah beban sumber Dana Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RK-OPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan ditahun 2025. Rumusan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, kami susun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan faktor capaian kinerja pelayanan pada tahun-tahun sebelumnya. sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencanangan Perangkat Daerah (RPD) 2025-2026.

Selain pertimbangan faktor capaian kinerja RPJMD, faktor kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara juga sebagai salah satu faktor yang menjadi pertimbangan kami dalam menetapkan program dan kegiatan pada tahun 2025. Disisi lain, ketersediaan Sumber Daya Ekonomi,

Tenaga serta Perangkat, Peralatan Dan Perlengkapan dalam menunjang pelayanan dibidang komunikasi, informasi dan persandian merupakan pertimbangan yang menjadi langkah utama fokus pembangunan yang kami jabarkan dalam program dan kegiatan di tahun 2025.

Untuk mengejar Ketertinggalan Pembangunan Sektor Kominfo di Maluku Utara Maka Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 4 Program 13 Kegiatan dan 40 Sub kegiatan sebagaimana Tercantum dalam Kep mendagri 900.1.15.5-1317 tahun 2023, sementara sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan berdasarkan rumusan program dan kegiatan yaitu sebagaimana yang kami sajikan dalam tabel berikut.

Perlu kami uraikan bahwa, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan berdasarkan rumusan program dan kegiatan yaitu :

1. Lokasi Program Dan Kegiatan Yang Tersebar Di Kawasan Lingkungan Kantor Gubernur Maluku Utara, yaitu program dan kegiatan yang dilaksanakan di 1 lokasi yaitu dilokasi sofifi
2. Lokasi Program Dan Kegiatan Yang Tersebar Di Kawasan Kabupaten Dan Kota yaitu program dan kegiatan yang bersifat koordinasi dan konsultasi serta survey, Serta Diluar Kawasan Provinsi Maluku Utara yang bersifat koordinasi dan konsultasi serta pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Serta Bimbingan Teknis.
3. Lokasi Program Dan Kegiatan Yang Tersebar Langsung Ke Masyarakat Provinsi Maluku Utara, yaitu program dan kegiatan yang dipusatkan langsung ke masyarakat yang berada di wilayah kabupaten dan kota dimana lokasi masyarakat yang menjadi fokus kegiatan.

Selain itu, untuk membiayai kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan, pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Sementara sumber pendanaan lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan struktur penganggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.



RENCANA KERJA DISKOMINFO SAN TAHUN 2025

Tabel : 3.3
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2025
Provinsi Maluku Utara

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian																
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2020 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d (tahun n-1)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun(tahun lalu /n-1)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2022 (tahun berjalan/n-3)		Catatan
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
2	10				Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi Dan Informatika											
2	10	1			Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian											
2	10	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terkelolanya Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kominfo Dan Persandian Dapat Terwujud										
2	10	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengelolaan Surat Masuk Dan Keluar	720	Surat	0	150	150	100%	0	150	3750,00%	Kasubag. Umum Dan Kepegawaian
2	10	1	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah SPD, SPP, SPM dan SPJ	100%	SPD, SPP,SPM DAN SPJ	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00%	Bendahara
2	10	1	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bahan-bahan Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Diskominfo	250	Bahan	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00%	Kasubag. Umum Dan Kepegawaian
2	10	1	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Proses dan pengurusan Administrasi kenaikan Pangkat Pegawai	1	Paket	0	1	1	100%	0	1	25,00%	Kasubag. Umum Dan Kepegawaian
2	10	1	1	22	Penyedia Administrasi Kepegawaian	ASN	100%	Pengurusan Administrasi	0	40	100	250%	0	100	2500,00%	Kasubag. Umum Dan Kepegawaian
2	10	1	1	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Barang Dan Alat	50	Paket	0	50	50	100%	0	50	1250,00%	BMD
2	10	1	1	20	Penyediaan Jasa tenaga honoror	Jumlah SDM yang diangkat menjadi Pegawai Honoror	11	Tenaga Honoror	0	11	0	0%	0	0	0,00%	Kasubag. Umum Dan Kepegawaian
2	10	1	1	23	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan	40	Pemeliharaan	0	40	0	0%	0	0	0,00%	BMD
2	10	1	1	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Makan Minum Pegawai	12	Bulan	0	12	12	100%	0	12	300,00%	
2	10	1	1	18	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Perjalanan	25	Perjalanan	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00%	Sekretariat
2	10	1	1	19	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan	60	Perjalanan	0	60	60	100%	0	60	1500,00%	Kasubag. Umum Dan Kepegawaian



RENCANA KERJA DISKOMINFO SAN TAHUN 2025

2	10	1	1	22	Rapat Koordinasi Persandian	Jumlah Perjalanan	36	Perjalanan Penyediaan Peralatan dan	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00%	Kasubag. Perencanaan, Keuangan Dan BMD
2	10	1	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Perlengkapan Kantor	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00%	
2	10	1	1	24	Penyediaan Jasa Tenaga Ahli/Staf Khusus Gubernur Bidang IT	Tenaga IT	6	Jasa Tenaga Ahli/Staf Khusus Gubernur Bidang IT	0	6	6	100%	0	6	150,00%	
2	10	1	1	3	Penyediaan Jasa SPBE	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	100	100	100%	0	100	2500,00%	Kasubag. Perencanaan, Keuangan Dan BMD
2	10	1	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Betambahnya SDM Pada Bagian Perencanaan										
2	10	1	5	4	Bimbingan Teknis Sistem Aplikasi Perencanaan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang	0	5	5	100%	0	5	125,00%	Kasubag. Umum Dan Kepegawaian
					Sinkronisasi Perencanaan	Sinergitas perencanaan OPD	1	kegiatan	0	1	1	100%	0	1	25,00%	Kasubag. Umum Dan Kepegawaian
					Bendmark Penerapan E-govemment	Terlaksananya E-Govemment	1	Paket	0	1	1	100%	0	1	25,00%	Kasubag. Umum Dan Kepegawaian
					Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya SDM	1	Paket	0	1	1	100%	0	1	25,00%	Kasubag. Umum Dan Kepegawaian
					Bimtek Pelaksanaan SOP	Tersedianya SDM	1	Paket	0	1	1	100%	0	1	25,00%	Kasubag. Umum Dan Kepegawaian
2	10	1	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tersusunnya Kebutuhan Dokumen Dan Laporan Bidang Kominfo Dan Persandian Dapat Terwujud										
2	10	1	6	5	Penyusunan dan Penginputan Renja, LKJ, LPPD, dan RKA/DPA	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Keuangan	5	Dokumen Perencanaan	0	5	5	100%	0	5	125,00%	Kasubag. Perencanaan, Keuangan Dan BMD
2	10	1	6	6	Penyusunan dan Penginputan Renstra	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Keuangan	1	Dokumen	0	1	1	100%	0	1	25,00%	Kasubag. Perencanaan, Keuangan Dan BMD
2	10	1	6	7	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan	1	Dokumen	0	1	1	100%	0	1	25,00%	Kasubag. Perencanaan, Keuangan Dan BMD



RENCANA KERJA DISKOMINFO SAN TAHUN 2025

2	10	1	20		Program Fasilitas Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedianya Sistem Informasi Dan Komunikasi Berbasis Teknologi Yang Dapat Digunakan Dalam Melaksanakan Tugas Aparatur										
2	10	1	20	1	Pengembangan Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi (Kota Sofifi)	Jumlah Laporan Perjalanan Koordinasi dan Konsultasi	1	Kegiatan	0	1	1	100%	0	1	25,00%	Kasie Tata Kelola Persandian
2	10	1	20	3	Pengembangan Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi (Blank spot)Halmahera Utara	Jumlah Laporan Perjalanan	1	Kegiatan	0	1	1	100%	0	1	25,00%	Kasie Tata Kelola Persandian
2	10	1	20	4	Pengembangan Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi (Blank spot) Taliabu	Jumlah Laporan Perjalanan	1	Kegiatan	0	1	1	100%	0	1	25,00%	Kasie Tata Kelola Persandian
2	10	1	21		Prog. Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Aplikasi Informasi											
2	10	1	21	1	Pengembangan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah SDM Tersedia	10	ASN	0	10	10	100%	0	10	250,00%	Bidang KIP
2	10	1	21	2	Bimbingan Teknis Penelolan PPID		1	Paket	0	1	1	100%	0	1	25,00%	Kasie Tata Kelola Persandian
2	10	1	21	3	Desiminasi Informasi Kegiatan pemerintah Daerah Melalui Website dan Medsos	Jumlah Informasi Melalui Web	1	Paket Lapora	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00%	Bidang Kominfo Publik
2	10	1	21	4	Pengembangan Aplikasi dan Web	Jumlah Aplikasi Web	10	Paket Aplikasi	0	10	10	100%	0	10	250,00%	Bidang Infrastruktur
2	10	1	21	5	Pengembangan dan Pengelolaan Media Center Provinsi Maluku Utara	Terkelolanya Medi Centre	1	Paket	0	1	1	100%	0	1	25,00%	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya
2	10	1	21	6	Kerjasama Penyediaan Jaringan/Jasa Internet	Tersedianya Informasi	1	Paket	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00%	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya
2	10	1	21	7	Pengelolaan Domain dan Hosting	Tersedianya Informasi	1	Paket	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00%	Kasi Aplikasi Infrastruktur
2	10	1	21	8	Kerjasama Pengelolaan Informasi Melalui Online	Jumlah Informasi	150	Infomasi	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00%	Kasie Layanan Manajemen Data Dan Informasi E-Government
2	10	1	21	9	Pembuatan Website SKPD Provinsi Maluku Utara	Jumlah Kapasitas Bandwidth	100	Mbps	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00%	Kepala Seksi Layanan Infrastruktur, Komunikasi dan Keamanan Jaringan TIK



RENCANA KERJA DISKOMINFO SAN TAHUN 2025

2	10	1	21	10	Pengembangan Rancangan Teknis SPBE Provinsi Maluku Utara	Tersedianya Layanan Informasi Online Pemda.	1	Paket	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00%	Kasie Layanan Manajemen Data Dan Informasi E-Government
2	10	1	21	11	Pembangunan Satu Data Maluku Utara	Terwujudnya satu Data Prov. Maluku Utara	100%		0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00%	Kasie Pelayanan Penyelenggaraan E-Government
2	10	1	21	12	Operasional Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku Utara	Tersedianya Data dan Informasin Covid-19	100%		0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00%	Kasie Pelayanan Penyelenggaraan E-Government
2	10	1	22		Program : Penyelenggaraan Persandian dan Statistik											Kasie Layanan Infrastruktur Komunikasi Dan Keamanan Jaringan Tik
2	10	1	22	1	Sertifikat Elektronik	Tersedianya Statistik Elektronik	60		0	60	60	100%	0	60	1500,00%	Kepala Bidang Persandian dan Statistik
2	10	1	22	2	Mengikuti Seleksi Diklat Sandiman Dasar				0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00%	Kepala Bidang Persandian dan Statistik
2	10	1	22	3	Sterilisasi Kontra Pengindaran Pada Aset Perangkat Daerah	Pengembangan BTS			0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00%	Kepala Bidang Persandian dan Statistik
2	10	1	22	14	Mengikuti Diklat Sandiman dan Diklat Sandiman Dasar	-Tersedian SDM Persandian			0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00%	
2	10	1	22	15	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi Sandi (JKS)	Tersedianya Dokumen Jaringan Kominfosan	1	Dokumen	0	1	1	100%	0	1	25,00%	
2	10	1	22	6	Pelaksanaan Pengamanan Sinyal Melalui Jamer	Data untuk Daerah Blankspot (3T)	3	Kab	0	3	3	100%	0	3	75,00%	Bidang Statistik dan Persandian
2	10	1	22	7	Koordinasi Persandian/Statistik Sektoral	Jumlah Pengelola	7	Orang	0	7	7	100%	0	7	175,00%	Bidang Statistik dan Persandian
2	10	1	22	8	Pengelolaan Keamanan Sistem Informasi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Malut				0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00%	Bidang Statistik dan Persandian
2	10	1	22	9	Penerapan Jaringan Komunikasi Sandi di Lingkup Pemerintah Malut				0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00%	Bidang Statistik dan Persandian
2	10	1	22	11	Pengelolaan Data Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara	Tersedianya Data Sektoral	1	Paket	100	100	100	100%	0	200	5000,00%	Bidang Statistik dan Persandian
2	10	1	22	12	Pengembangan SDM Urusan Persandian/Statistik Sektoral	Tersedianya SDM Persandian	1	Paket	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00%	Bidang Statistik dan Persandian



RENCANA KERJA
DISKOMINFO SAN
TAHUN 2025

2	10	1	24		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika						#DIV/0!		0	0,00%	
2	10	1	24	1	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Provinsi		1	Paket	100	100	100	100%	200	5000,00%	Bidang Statistik dan Persandian



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun 2025, merupakan dokumen Rencana Kerja yang menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan serta sebagai dasar untuk mengajukan berbagai usulan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan dan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Diskominfosand pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025.

Hasil evaluasi kinerja pelayanan pada tahun 2024 dan telaahan terhadap isu-isu perkembangan dunia teknologi saat ini dan yang akan datang, serta mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah, maka ada beberapa catatan penting yang menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja pelayanan agar target capaian kinerja RPJMD dan Resntra OPD dapat tercapai.

Program kegiatan yang telah direncanakan, dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan instrumen pengendalian tersebut, diharapkan terjadi kesesuaian antaraperencanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam target capaian pada setiap tahapan dengan pelaksanaannya, dan apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, dan Informatika sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Komitmen, konsistensi, disiplin, kerja keras, semangat, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Dinas Komunikasi dan Informatika mutlak diperlukan untuk tercapainya sasaran SKPD tahun 2025.



Adapun perhatian dan fokus arah pembangunan dan pelayanan bidang komunikasi, informasi dan persandian itu sebagaimana yang telah kami cantumkan pada tabel 3.3

Pada tabel 3.3 tersebut merupakan skema prioritas pelaksanaan program dan kegiatan dan sebagai langkah antisipasi terjadinya penurunan pagu anggaran akibat dari kondisi kemampuan keuangan daerah yang tidak sesuai dengan rencana, sehingga apabila anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan ketersediaan anggaran yang diajukan, maka skema tersebut menjadi solusi dalam menyesuaikan kebutuhan anggaran dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;

Untuk itu, melalui dokumen rencana kerja ini kami mengharapkan agar stakeholder yang memiliki kapasitas, dapat menguji dan mereview isi materi maupun kaidah-kaidah penyusunan dokumen rencana kerja ini, agar dapat menjadi dokumen rencana kerja yang nantinya dapat saling mendukung rencana kerja dengan perangkat daerah lainnya serta rencana kerja pemerintah daerah.

Kami menyadari bahwa, dokumen rencana kerja ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kekeliruan. Untuk itu, ide, kritik serta saran yang bertujuan memperbaiki sangat kami harapkan, agar kekurangan itu dapat disempurnakan dan kekeliruan itu dapat diperbaiki demi tersusunnya kesempurnaan dokumen rencana kerja yang dapat bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara;

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan sebagai landasan, pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.